

# **OMBUDSMAN KALSEL RANCANG KEGIATAN PARTISIPASI MASYARAKAT BERSAMA DANGSANAK OMBUDSMAN**

**Kamis, 10 Januari 2019 - Rizki Arrida**

Ombudsman Kalsel merancang kegiatan partisipasi masyarakat 2019, dimulai dengan agenda evaluasi kegiatan partisipasi masyarakat tahun 2018, dan menyusun agenda kegiatan partisipasi masyarakat bersama Dangsanak Ombudsman untuk tahun 2019. Bertempat di Aula Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, pukul 13.30 WITA (9/01/19). Pertemuan kali ini, dihadiri oleh masing-masing perwakilan Dangsanak Ombudsman, yang terdiri dari Perwakilan Pusat Layanan Autis, Lembaga Permasyarakatan Masyarakat Adat, Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Banjarmasin, Paris Barantai, Kelompok Perempuan Potensial, Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Perwakilan Ikatan Guru Indonesia, dan Perwakilan Politeknik Negeri Banjarmasin.

Ombudsman Kalsel menggiatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan berdasarkan, Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat penting, sebagai sarana memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi penyelenggara pelayanan publik. Serta, sebagai perwujudan hak demokrasi masyarakat, untuk dalam proses pembangunan dan mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Partisipasi Masyarakat tahun 2019, direncanakan Ombudsman dan Dangsanak Ombudsman untuk fokus memperkuat kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi, khususnya di Kalimantan Selatan. Agenda aksi partisipasi masyarakat nantinya akan dibagi dalam mengamati beberapa bidang layanan, seperti layanan pada masyarakat adat, kelompok disabilitas, pendidikan, dan menggagas program tahunan untuk diselenggarakan bersama instansi penyelenggara pelayanan publik, dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.